

Polemik Geotermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger

Wilfridus Fon¹, Damianus L. Kedang²

¹Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia (fonwilfridus02@gmail.com)

²Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia (damyankedang4@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 7 October 2025

Revised: 13 October 2025

Accepted: 13 November 2025

Available online: 29 November 2025

Kata Kunci:

Geotermal Poco Leok; Kapitalisme;
Sosialisme; Perhitungan Penderitaan;
Perhitungan Makna

Keywords:

Poco Leok Geothermal; Capitalism;
Socialism; Calculation of Suffering;
Calculation of Meaning

ABSTRAK

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017 yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi telah membuka gerbang masuknya operasi proyek geotermal di NTT. Namun, akhir-akhir ini, proyek geotermal di NTT telah melahirkan pro dan kontra yang melibatkan kalangan mahasiswa, akademisi, pemuka agama, tokoh politik, tokoh adat, dan masyarakat sipil. Salah satu lokus polemik geotermal yang masih terus menyala di NTT ialah Poco Leok di Kabupaten Manggarai. Pemerintah menilai bahwa proyek geotermal akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas listrik. Sementara itu, masyarakat Poco Leok

menganggap bahwa geotermal berpotensi menimbulkan luka ekologis dan luka kemanusiaan. Perbedaan cara pandang tersebut memungkinkan bentrokan antara pemerintah dan masyarakat tidak terelakkan yang bermuara pada tindakan teror, intimidasi, dan represi negara terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan memperkenalkan etika politik pembangunan menurut Peter L. Berger. Bagi Berger, pembangunan adalah upaya menghapus derita manusia. Karena itu, Berger mengkritik model pembangunan berideologi kapitalisme dan sosialisme yang dinilainya sama-sama menciptakan luka ekologis dan luka kemanusiaan. Atas dasar ini, Berger mengusulkan dua kriteria etis dalam pengambilan kebijakan pembangunan, yaitu perhitungan penderitaan fisik — kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, wabah penyakit, kerusakan ekologis, ketidakmerataan pendapatan, ketertindasan, dan kelaparan — dan perhitungan makna — pertimbangan atas raibnya makna atau hilangnya pengetahuan masyarakat mengenai kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Etika politik pembangunan Berger kiranya menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah Manggarai terkait kelanjutan proyek geotermal di Poco Leok. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan dari pelbagai buku, literatur-literatur serta artikel-artikel ilmiah pilihan yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema artikel ini.

ABSTRACT

The Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Number 2268 K/30/MEM/2017, which designates Flores as a geothermal island, has opened the gate for geothermal project operations in NTT. However, in recent years, geothermal projects in NTT have given rise to controversy, involving students, academics, religious leaders, political figures, traditional leaders, and civil society. One of the loci of geothermal polemics that continues to rage in NTT is Poco Leok in Manggarai Regency. The government claims that geothermal projects will bring significant changes to people's lives, especially in increasing electricity capacity. Meanwhile, the people of Poco

Leok consider that geothermal projects have the potential to cause ecological and humanitarian wounds. These differences in perspective allow for inevitable clashes between the government and local communities, which lead to acts of terror, intimidation, and state repression. This research aims to introduce the political ethics of Berger's development theory. For Berger, development is an effort to eliminate human suffering. Therefore, Berger criticizes the development model rooted in both capitalist and socialist ideologies, because it creates both ecological and humanitarian wounds. On this basis, Berger proposes two ethical criteria in development policymaking, namely the calculation of physical suffering — poverty, injustice, hunger, disease outbreaks, ecological damage, income inequality, and the oppression — and the calculation of meaning — considering the loss of meaning or the loss of people's knowledge of local wisdom, culture, and civilization. The political ethics of Berger's development should be a serious consideration for the Manggarai government regarding the continuation of the geothermal project in Poco Leok. In this study, the author draws on literature reviews from various books, articles, and selected scientific papers that have a close relation to the title or theme of this article.

PENDAHULUAN

Belakangan, diskursus seputar proyek geothermal menjadi salah satu tema aktual di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wacana seputar geothermal yang digadang-gadang potensial menghasilkan energi terbarukan *de facto* telah memicu perdebatan yang kian memanas dan meluas yang melibatkan para mahasiswa, akademisi, pemuka agama, tokoh politik, tokoh adat, masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Tak sedikit orang menyambut dengan tangan terbuka kehadiran geothermal — kelompok pro. Dan, tak sedikit pula orang menunjukkan sikap penolakan kukuh terkait proyek geothermal — kelompok kontra. Bahkan, geothermal kerap menjadi *trending topic* yang memenuhi halaman media pemberitaan baik daring maupun cetak mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Salah satu titik polemik geothermal yang masih terus membara di NTT ialah Poco Leok di Kabupaten Manggarai. Selama sekitar empat tahun terakhir, Poco Leok menjadi lokus penolakan proyek perluasan PLTP Ulumbu oleh PT PLN (Persero) dan anak usahanya. Ada perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat kelompok kontra. Pemerintah menganggap bahwa geothermal akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan, terkhusus terkait kebutuhan listrik di Kabupaten Manggarai dan wilayah lainnya di Flores. Meskipun demikian, masyarakat kelompok kontra mencurigai bahwa geothermal berpotensi menimbulkan luka ekologis — seperti mengancam ruang hidup, istilah yang menggambarkan kesatuan antara tempat tinggal, kampung, lahan ulayat, mata air hingga situs kuburan leluhur mereka — dan luka kemanusiaan — seperti pelanggaran HAM dan perendahan martabat masyarakat. Perbedaan cara pandang tersebut memungkinkan pro-kontra proyek geothermal masih terus menggema di ruang publik baik lewat diskusi-diskusi publik, tulisan-tulisan, maupun aksi demonstrasi.

Resistensi masyarakat kelompok kontra Poco Leok diperparah oleh kenyataan bahwa mereka memandang bahwa proyek geothermal ini merupakan investasi paksa yang berpotensi mengorbankan masyarakat lokal. Proyek geothermal yang dibuat lebih berorientasi pada pemujaan profit tanpa harus berpikir panjang tentang aneka dampak destruktif yang timbul setelahnya. Selain itu, Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi oleh bupati diterbitkan tanpa persetujuan yang memadai dari masyarakat

(Mandela, 2023). Di sini, pemerintah dianggap menihilkan dialog publik dengan masyarakat. Masyarakat kelompok kontra merasa diri didenominasi sebagai massa mengambang. Mereka juga merasa hak-hak politis mereka dipasung. Ada juga ketakutan, dan mungkin juga pengalaman, bahwa jika ada yang berani menolak dan mengkritisi kebijakan pemerintah, maka pemerintah tidak tanggung-tanggung meresponsnya dengan menggunakan senjata teror dan tindakan represif. Situasi seperti ini dapat menciptakan lahan subur bagi “kongkalingkong” pemerintah dengan pengusaha dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Poespowardojo & Seran, 2016).

Terdorong oleh suatu ekspektasi akan terciptanya pembangunan geotermal Poco Leok yang humanis, maka pelbagai pandangan mencoba mengintervensi ke dalam. Wildan Ulul Albab — Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada — dalam artikelnya berjudul “*Kajian Terhadap Pembangunan Geotermal di Pulau Flores Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan (John Rawls)*” berupaya mengkaji konflik yang terjadi dalam pembangunan geotermal di Flores berdasarkan perspektif keadilan John Rawls. Salah satu wilayah kajiannya ialah polemik geotermal di Poco Leok. Kajian Albab bertolak pada dua pertanyaan fundamental yaitu *pertama*, bagaimana konflik yang terjadi di Pulau Flores terkait penolakan proyek pembangunan geotermal; *kedua*, bagaimana analisis perlindungan hak masyarakat hukum adat di Pulau Flores berdasarkan teori keadilan (Albab, 2023).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Alfian Tanggang dan Theodor Advent Primus Bala Lajar — mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Dalam artikel mereka yang bertajuk “*Bumi Sebagai “Rumah”: Kritikan Terhadap Proyek Geotermal Poco Leok dan Mataloko Dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si’*”, mereka menggunakan Ensiklik *Laudato Si’* (2015) yang ditulis oleh mendiang Paus Fransiskus untuk mengkritik proyek Geotermal di Poco Leok dan Mataloko karena dicurigai potensial menimbulkan kerusakan ekologis yang dahsyat. Karena itu, mereka menegaskan agar kelanjutan proyek geotermal di kedua wilayah tersebut mesti dipertimbangkan dengan baik (Tanggang & Lajar, 2024).

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, dalam penelitian ini, penulis berikhtiar mengeksplorasi etika politik pembangunan Peter L. Berger dengan bereferensi pada salah satu *opus magnum* Berger yakni *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Buku ini merupakan kritik Berger terhadap kapitalisme dan sosialisme yang sama-sama dianggap sebagai mitos: pertumbuhan dan revolusi. Mitos pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme dinilai tidak saja melahirkan ketidakadilan dan kesenjangan karena tidak jelas siapa yang diprioritaskan dalam pembangunan, melainkan juga dicurigai memicu kerusakan ekologis yang tinggi. Sedangkan, mitos revolusi dalam sosialisme dianggap melahirkan ketidaknyamanan hidup karena senjata teror yang dipakai untuk mengatur pencapaian perubahan masyarakat. Demi tujuan perubahan yang dirancang elite pembangunan, penderitaan manusia sekarang ini dalam segala bentuknya dibenarkan. Bagi Berger, kedua ideologi ini sama-sama tidak memperhitungkan penderitaan manusia dalam pelbagai bentuknya, dan juga mengabaikan prinsip keadilan terhadap generasi mendatang.

Dengan berkonfrontasi pada kenyataan yang ada, melalui buku ini, Berger menyajikan suatu etika politik pembangunan baru di mana biaya-biaya manusiawi harus menjadi tolok ukur setiap kebijakan politik. Pendekatan etika politik yang

diajukan adalah suatu filsafat manusia yang memusatkan segala perhatiannya pada manusia yang seutuhnya konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah manusia yang menderita. Pembangunan yang mengesampingkan humanitas adalah inti kritik Berger. Karena itu, Berger mengajukan dua kriteria etis yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan, yakni pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan perhitungan makna (*calculus of meaning*). Perhitungan penderitaan merujuk pada berbagai penderitaan fisik seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, penindasan akibat pembangunan. Sedangkan, perhitungan makna merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Dengan menyelami pemikiran Berger ini, penulis akan mencoba untuk membuat suatu tilikan terkait nilai relevansi etika politik pembangunan Berger bagi proyek pembangunan geotermal di Poco Leok sebagai *telos* penelitian ini.

METODE PENULISAN

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan. Penulis mencari dan meramu pelbagai buku, literatur serta artikel-artikel ilmiah pilihan yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema artikel ini. Selain itu, penulis mengakses informasi-informasi aktual yang berkelindan erat dengan tema yang diangkat dengan menggunakan sumber dari internet yang memiliki validitas.

SEKELUMIT POLEMIK GEOTERMAL POCO LEOK

Pembangunan geotermal adalah salah satu proyek strategis nasional. Geotermal memanfaatkan tekanan panas bumi (Fandari, Daryanto, & Suprayitno, 2014). Proyek geotermal meliputi aktivitas pengeboran sumur-sumur di dalam perut bumi guna menghasilkan uap atau air panas yang dapat digunakan sebagai energi untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan daerah (Towijaya, Musyhar, Satria, & Ubaidillah, 2019). Di Indonesia, ada beberapa daerah yang dianggap kaya akan kandungan geotermal termasuk pulau Flores. Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017, Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi (*Flores Geothermal Island*) karena menyimpan kandungan geotermal mencapai 1000 MW (Badin, 2023). Keunggulan ini menempatkan Flores sebagai kawasan strategis dalam agenda transisi energi nasional (Andriyani, 2025). Sebagai konsekuensi logisnya, hingga saat ini, pembangunan geotermal di pulau Flores sudah beroperasi di 16 titik wilayah.

Salah satu wilayah yang sedang diusahakan saat ini adalah Poco Leok di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Pembangunan geotermal di Poco Leok merupakan usaha perluasan wilayah oleh PLTP Ulumbu yang sudah diresmikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2012 dengan pendanaan dari Bank Jerman *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW). Pembangunan ini memanfaatkan potensi panas bumi yang cukup besar di Poco Leok dengan tujuan meningkatkan kebutuhan listrik di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya. Pemerintah Daerah Manggarai turut mendukung pembangunan tersebut dengan memberikan izin operasi

kepada PLTP Ulumbu untuk membuka unit baru di Poco Leok. Upaya yang dilakukan PLTP Ulumbu sudah melewati tahap eksplorasi dan memasuki tahap pembangunan.

Sejalan dengan itu, geothermal tampaknya mendapat afirmasi positif dari Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, karena menjanjikan kemajuan yang luar biasa. Bukti keberpihakan pemerintah terkonfirmasi dalam Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Nabit pada 1 Desember 2022 Nomor HK/417/2022 tentang penetapan lokasi perluasan PLTP Unit 5-6 di Poco Leok. Bahkan, saat Musrenbang Kabupaten Manggarai tahun 2026, Nabit menegaskan bahwa “wilayahnya tidak akan maju kalau harus bergantung pada pertanian, tetapi pada industrialisasi” (Tim Flores, 2025a). Nabit menekankan agar masyarakat menerima dan mendukung pembangunan geothermal demi kemajuan daerah Manggarai, terutama dalam meningkatkan kebutuhan akan listrik. Nabit optimis bahwa proyek geothermal adalah sesuatu yang normal karena sejalan dengan program peningkatan energi hijau nasional. Selain itu, proyek geothermal juga bertujuan untuk membangun daerah yang lebih maju dengan memanfaatkan inovasi teknologi modern yang lebih ramah lingkungan.

Atas nama pembangunan geothermal, pasca dikeluarkannya SK Bupati Nabit, petugas PT PLN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan warga pro-proyek geothermal Poco Leok turun langsung melakukan pematokan lahan di wilayah ulayat. Tindakan ini dinilai tanpa sepengetahuan masyarakat adat Poco Leok terutama kelompok kontra. SK yang diterbitkan oleh Bupati Nabit tersebut juga dinilai telah dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat Poco Leok kelompok kontra sebagai tuan tanah. Bahkan, Wakil Bupati, Heri Ngabut, mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam penetapan SK tersebut (Mandela, 2023). Hal ini menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak, terutama masyarakat adat yang tidak menyetujui hal itu. Masyarakat kontra-geothermal menuntut Bupati Nabit agar segera mencabut SK tersebut. Namun, hingga saat ini, tuntutan masyarakat tidak direspons secara positif oleh Bupati Nabit.

Hal ini memicu kemarahan masyarakat kelompok kontra karena mereka menganggapnya sebagai suatu penindasan. Atas dasar ini, warga Kampung Lungar, Tere, Rebak, Racang, Macu, dan Cako bersatu menghadang tindakan aparat saat melakukan pematokan lahan yang berujung ricuh dan bentrok dengan aparat di sekitar lokasi. Masyarakat kelompok kontra menganggap bahwa aparat telah melanggar prinsip masyarakat adat bahwa aktivitas apapun yang berkaitan dengan *lingko* harus melalui kesepakatan masyarakat adat di *Mbaru Gendang* (rumah adat) (Tim Flores, 2023). Masyarakat juga menilai bahwa keputusan pemerintah dalam mendukung pembangunan geothermal tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya deliberasi publik. Karena itu, masyarakat kontra masih menunjukkan penolakan kukuh adanya pembangunan geothermal tersebut. Masyarakat menilai bahwa pembangunan geothermal yang memanfaatkan panas bumi berpotensi merugikan kehidupan mereka. Misalnya, gas beracun hasil pengolahan panas bumi dapat merusak tanaman yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar, mencemari air, menimbulkan penyakit, dan kebisingan proyek akan mengganggu ketenangan masyarakat.

Namun, pihak PT PLN dan pemerintah tetap bersikeras untuk merealisasikan proyek ini, bahkan dengan cara represif, hingga menyebabkan puluhan orang luka-luka, bahkan ada di antaranya tidak sadarkan diri (Wicaksono, 2023). Percekcokan

demis percekcoan pun kerap terjadi. Pada 20 Juni 2023, tercatat empat orang warga perempuan dan lima orang laki-laki mengalami kekerasan karena ditendang dan didorong hingga terjatuh ke selokan (Karangora, 2023). Pada 2 Oktober 2024, aparat keamanan juga menangkap tiga orang warga dan satu orang jurnalis bernama Herry Kabut, pemimpin redaksi *Floresa*. Herry mengaku mengalami perlakuan kasar — dicekik, dipukul, dan ditinju sehingga pelipis kiri bengkak dan lebam, dan rahang kanan dan area hidungnya terluka — saat hendak meliput aksi unjuk rasa masyarakat adat yang menolak proyek geotermal ke wilayah mereka (Hasyim, 2024).

Upaya perlawanan masyarakat adat Poco Leok kelompok kontra terhadap kebijakan pembangunan geotermal masih terus berlangsung hingga saat ini. Masyarakat adat beberapa kali melakukan unjuk rasa lewat demonstrasi demi menyuarakan keadilan dan hak hidup masyarakat adat. Hingga pada 5 Juni 2025 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, satuan masyarakat adat dari berbagai wilayah turun ke jalan menyerukan perlawanan terhadap proyek pembangunan geotermal di Poco Leok. Masyarakat adat mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak merespons tuntutan masyarakat adat. Pemerintah dinilai telah mengabaikan aspirasi masyarakat untuk menghentikan rencana pembangunan proyek ini. Sebelum itu, pada 3 Maret 2025, satuan pemuda dari masyarakat adat Poco Leok melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Manggarai. Dalam aksi tersebut, para pemuda menuntut pencabutan SK Bupati terkait penetapan lokasi proyek geotermal di wilayah Poco Leok karena dianggap merugikan masyarakat adat di wilayah tersebut (Mesa, 2025).

Aksi unjuk rasa pada 5 Juni 2025 diwarnai oleh beberapa hal berbau negatif, mulai dari tindakan kriminal oleh aparat keamanan hingga pembubaran massa aksi oleh massa tandingan. Masyarakat Poco Leok yang menggelar orasi di depan kantor bupati harus dihentikan karena memperoleh perlawanan dari massa tandingan (kelompok pro-proyek geotermal) yang dicurigai telah dikerahkan oleh Bupati Nabit (Tim *Floresa*, 2025b). Masyarakat Poco Leok yang berhasil dicegat oleh massa tandingan langsung dibawa ke kantor polisi. Selain itu, para jurnalis *Floresa* juga dilarang untuk meliput peristiwa yang berlangsung di depan kantor bupati tersebut. Seruan masyarakat Poco Leok yang menuntut pemenuhan prinsip keadilan dinilai tidak dihiraukan oleh Nabit. Bahkan, ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan terus berlanjut meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai bupati.

ETIKA POLITIK PEMBANGUNAN BERGER

Pada galibnya, pembangunan selalu mengandaikan proses perubahan yang terencana terhadap kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang memungkinkan terciptanya perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan dalam suatu tatanan masyarakat. Karena itu, ide tentang pembangunan selalu disandingkan dengan gagasan ekonomi modern tentang industrialisasi, urbanisasi, dan pemanfaatan secara luas teknologi di pelbagai sektor ekonomi. Di sini, pembangunan dinilai berpotensi mengubah kondisi masyarakat dari yang kurang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan menjadi lebih efektif dan efisien dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada (Haryon, 2024).

Dalam sejarah perkembangan peradaban filsafat, ada banyak filsuf yang menjadikan pembangunan sebagai salah satu bahan permenungan filosofis mereka. Salah satunya ialah Peter L. Berger (1929-2017). Berger menuangkan pikirannya tentang pembangunan dalam bukunya berjudul *Pyramids of Sacrifice* (1974). Dalam buku ini, Berger menyajikan kritik terhadap pembangunan berideologi kapitalis dan sosialis. Dia berpendapat bahwa kapitalisme dan sosialisme di dunia ketiga kerap mengabaikan *human costs* (biaya-biaya manusiawi) dan *social costs* (biaya-biaya sosial) (Berger, 2004). Di balik kegemilangan prestasi kemajuan kapitalisme dan revolusi sosialisme, terdapat banyak manusia yang memikul penderitaan dalam aneka bentuk. Dilatarbelakangi oleh rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, Berger mengajukan dua kriteria etis yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan, yakni pertama, perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan perhitungan makna (*calculus of meaning*) (Berger, 2004).

Bagi Berger, pembangunan adalah masalah, dan masalah dalam pembangunan selalu berkaitan dengan pertanyaan “*bagi siapa?*” (Berger, 2004). Pertama, pembangunan menjadi permasalahan bagi elite politik. Berger menegaskan bahwa elite politik memiliki karakter yang beragam. Ada elite politik yang peka karenanya memiliki perhatian penuh pada masyarakat yang menderita. Ada juga elite politik yang pragmatis dan tidak peduli pada penderitaan masyarakat (Berger, 2004). Dalam konteks pembangunan, elite politik bertanggung jawab penuh dalam merancang dan menentukan kebijakan pembangunan. Setiap kebijakan pembangunan yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan masyarakat bila elite politik memiliki komitmen penuh pada predikat mereka sebagai pelayan publik. Sebaliknya, ketika elite politik yang merumuskan kebijakan memiliki ambisi pragmatis yang berlebihan, maka kebijakan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi sulit.

Kedua, pembangunan menjadi permasalahan bagi teoritis. Dulu, ada beragam teori tentang pembangunan yang lahir dari belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat. Berkat kepintaran mereka, pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah Eropa mengalami kemajuan pesat. Hal ini dimungkinkan karena mereka mampu mendefinisikan situasi-situasi dalam negara mereka sendiri. Kemudian, ajaran-ajaran dan teori-teori dari dunia Eropa ditiru oleh negara-negara di luar Eropa. Namun, lambat laun, muncul kesadaran dalam diri orang-orang di luar Eropa bahwa tidak semua teori dari Eropa sesuai, karena bertentangan dengan keyakinan pribumi. Di sini, Berger melihat bahwa para teoritis juga berpotensi terbagi dalam rumpun yang bermusuhan sepanjang garis keahlian dan ideologi. Untuk pembangunan, ia akan dinilai secara berbeda-beda bila dipandang dari sudut ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, atau ilmu politik (Berger, 2004).

Ketiga, pembangunan merupakan sebuah permasalahan bagi sejumlah penduduk biasa atau masyarakat sipil terutama di negara-negara miskin. Masyarakat biasa rentan menjadi korban pembangunan. Betapa tidak, mereka acap kali tidak mempunyai atau hanya diberi sedikit kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan politik, dan temuan-temuan mereka tentang realitas hidup mereka secara sistematis diabaikan oleh teoritis. Bagi masyarakat biasa, masalah pembangunan ialah masalah hidup sehari-hari seperti kelaparan, krisis air bersih, penyakit, kebutuhan akan pekerjaan dan perumahan, serta hilangnya nilai-nilai yang biasanya memberi makna pada kehidupan (Berger, 2004).

Pada saat tertentu, para elite politik dan teoritis bekerja sama dalam merumuskan kebijakan politik. Elite politik membutuhkan buah pemikiran para teoritis untuk dijadikan kerangka teoritis bagi proyek pembangunan. Kemudian, para elite politik dan para teoritis membentuk kelompok yang berhadapan dengan massa dalam masyarakat. Bagi Berger, hal ini kerap terjadi di negara-negara maju di Eropa walaupun di sana sudah ada pendidikan massa dan lembaga-lembaga demokrasi perwakilan (Berger, 2004). Di hadapan masyarakat, keduanya memosisikan diri sebagai orang yang mampu membaca kondisi masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri sering kali kesulitan mendeskripsikan kondisi mereka sendiri dengan baik. Sebagai konsekuensi logisnya, apa yang dideskripsikan oleh elite politik dan para teoritis haruslah diterima oleh masyarakat. Sikap seperti ini akan mengarah pada kapitalisme dan sosialisme.

KRITIK TERHADAP KAPITALISME

Gagasan kapitalisme tentang pembangunan adalah proyeksi universal dari impian dunia Eropa termasuk Amerika. Kapitalisme memproklamirkan suatu keyakinan bahwa pembangunan akan dengan pasti memacu kemajuan ekonomi, keberlimpahan material, pertumbuhan tanpa batas, dan kebebasan politik masyarakat. Kapitalisme berorientasi pada tujuan untuk memperoleh profitabilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pembangunan (Haryon, 2024). Berger menegaskan bahwa mimpi kemajuan kapitalisme tersebut adalah mitos. Dalam kapitalisme, hakikat mitos pertumbuhan adalah impian akan pemujaan barang (*cargo cult*) — yakni tibanya semua pemberian modernitas yang menakjubkan dalam persediaan yang berlimpah-limpah bagi semua (Berger, 2004).

Kapitalisme memang menjanjikan suatu perubahan dan kemajuan serta masa depan yang cerah. Meskipun demikian, pemenuhan janji tersebut harus mengorbankan banyak manusia dalam bentuk penderitaan, teror, dan perang. Fakta tragis ini hendak mengandaikan bahwa kapitalisme telah gagal dalam memperjuangkan manusia. Skeptisisme Berger ini bertolak dari pertanyaan sederhana: apakah pertumbuhan ekonomi tanpa batas adalah tujuan yang berguna, menurut ukuran ekonomi sekalipun? Atau, dapatkah ekonomi berkembang tanpa batas jika itu dianggap sebagai sistem yang terlepas dari bagian-bagian lain dalam kehidupan masyarakat, misalnya biaya ekologis, sosial, dan budaya? Bagi Berger, pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek-aspek lain dari kehidupan, misalnya aspek ekologis akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya bumi dan peracunan persediaan makanan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan hidup di bumi (Berger, 2004).

Berhadapan dengan aneka dampak destruktif di atas, Berger mengkritik ideologi kapitalisme dengan mengemukakan dua pertanyaan pokok: siapa yang mengambil manfaat? Dan siapa mengambil keputusan? Menjawab kedua pertanyaan tersebut, Berger menegaskan bahwa sejarah pembangunan dalam dunia ketiga memperlihatkan bahwa kaum miskin *de facto* tidak mendapatkan apa pun. Efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) atau dalam rumusan yang lebih optimis, efek penyebaran (*spread effect*) tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat (Badj, 2024). Di banyak negara dunia ketiga, polarisasi dalam pembagian pendapatan dan kekayaan semakin meningkat di mana kelas-kelas bawah memperoleh semakin

sedikit dan bukannya semakin banyak. Begitu pula kondisi mutlak mereka juga tidak mengalami banyak perbaikan, jika pun ada (Berger, 2004).

Bagi Berger, pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan dan tidak memperbaiki keadaan masyarakat akar rumput bermula dari pendekatan pembangunan yang berwatak elitis. Pendekatan elitis mengacu pada fakta bahwa hanya elite politik dan kelompok-kelompok ahli yang memainkan peranan penuh dalam merumuskan arah pembangunan. Model pendekatan elitis, demikian Berger, mengabaikan prinsip partisipasi (Berger, 2004). Ide tentang partisipasi secara logis timbul dari pengertian bahwa pembangunan pada akhirnya adalah sebuah kategori moral. Sebagai kategori moral, Berger menegaskan bahwa pembangunan tidak sama seperti yang diumumkan oleh para ahli ekonomi dan para ahli lain betapa pun indahnnya bahasa mereka. Pembangunan bukanlah sesuatu yang harus diputuskan oleh para ahli, karena sama sekali tidak ada tenaga ahli mengenai tujuan-tujuan hidup manusia yang sepatutnya dikejar. Pembangunan adalah arah jalan yang patut untuk ditempuh dalam situasi tertentu, dan pilihan-pilihan utama yang harus diambil tidak bergantung pada keahlian teknis melainkan pada pertimbangan-pertimbangan moral (Berger, 2004).

Menyerukan partisipasi berarti memberi “hormat kognitif” kepada mereka yang bukan sebagai ahli. “Hormat kognitif” bukanlah suatu keputusan yang sewenang-wenang atau bahkan keputusan ideologis yang aneh. “Hormat kognitif” didasarkan pada pengertian bahwa manusia memiliki dunianya sendiri, dan tidak seorang pun dapat menafsirkan dunianya sendiri dengan lebih baik (atau secara lebih “ahli”) daripada ia sendiri. Jika orang memperhatikan betul-betul penghayatan orang-orang bukan ahli, maka ia mungkin memperluas kritik terhadap pembangunan kapitalis (dan memang terhadap modernisasi dalam setiap bentuknya) dengan suatu dimensi tambahan yang penting dengan memperhatikan apa yang boleh disebut “biaya-biaya budaya” dalam kapitalisme. Pada hakikatnya, cita-cita pembangunan kapitalis membantu perkembangan individualisme dan persaingan pribadi. Semua struktur pembangunan kapitalis potensial menghancurkan budaya kolektivitas dalam kebudayaan tradisional. Lalu, yang menggantinya adalah massa manusia perorangan yang mengalami anomie (Berger, 2004).

Hal ini dipertegas oleh Berger dalam tesis kelima belas bahwa: “mereka yang merupakan sasaran kebijakan politik harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus, tapi juga dalam merumuskan definisi-definisi situasi yang merupakan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan” (Berger, 2004). Bertolak dari tesis tersebut, Berger mengemukakan dua imperatif etis, yaitu pertama, manusia berhak atas partisipasi; dan kedua, hak partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan memaknai dunia dan kenyataan yang ia miliki. Kalau tidak demikian, sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri (Berger, 2004).

KRITIK TERHADAP SOSIALISME

Pembangunan berideologi sosialisme kerap digunakan oleh para pemimpin di dunia ketiga seperti Cina. Pembangunan di bawah ideologi sosialisme mengidealkan terjadinya sebuah revolusi. *Credo* revolusi yang dimaksudkan di sini merujuk pada hilangnya dominasi kaum kapitalis, penghapusan ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Kaum sosialis percaya bahwa revolusi membantu masyarakat dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik di masa depan karena masyarakat akan dibebaskan dari aneka bentuk penderitaan.

Namun, bagi Berger, revolusi yang dicita-citakan oleh sosialisme mengandung mitos—mitos revolusi, mitos tentang “orang-orang terpilih”, dan mitos penyelamatan dari keterasingan modernitas. Di sini, mitos yang dimaksud mengacu pada asumsi sosialisme bahwa pembangunan akan secara otomatis membawa kemajuan moral dan sosial. *De facto*, model pembangunan sosialis justru berpotensi menciptakan sentralisasi birokratis. Sentralisasi birokrasi ini mengacu pada fakta bahwa penentuan kebijakan pembangunan dimonopoli oleh elite politik. Monopoli kebijakan oleh elite politik memungkinkan kebijakan pembangunan sekadar mengartikulasikan kepentingan personal mereka sehingga dapat menghalangi tiap-tiap usaha untuk mencapai kepentingan umum (Bau, 2022). Sebagai akibatnya, model tersebut menghasilkan ketidakefisienan dan produktivitas yang rendah sebagaimana dalam sistem sosial pra-modern (Freedom Institute, 2021).

Berger menegaskan bahwa sosialisme mengandung suatu kecenderungan untuk bergerak ke arah totaliterisme karena suatu alasan sederhana: pada hakikatnya, sosialisme berusaha menyerap perekonomian ke dalam struktur negara, dan dengan sangat memperkuat kemungkinan-kemungkinan totaliter dalam tangan negara. Kecenderungan-kecenderungan totaliter ini, dengan risiko yang menyertai kekuasaan yang tidak dibatasi dan lalim, haruslah diperhitungkan sebagai salah satu biaya politik dalam sosialisme (Berger, 2004).

Ungkapan Berger di atas dibenarkan oleh pelbagai fakta sejarah. Salah satunya ialah pembangunan ideologi sosialisme di Cina. Berdasarkan pengamatan Berger, rezim sosialis Cina telah berhasil mengikis kelaparan. Kaum sosialis adalah kelompok yang pertama membentuk otoritas pusat yang kuat di seluruh negeri itu. Hal ini memberi ruang bagi mereka untuk menjalankan pelbagai usaha untuk mengatasi kelaparan yang sangat sulit dilakukan selama ini. Usaha mereka tampaknya berhasil. Nutrisi dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga Cina menjadi lebih baik terpenuhi. Selain itu, pencapaian ini diraih tanpa kesenjangan. Hampir dapat dipastikan bahwa distribusi keuntungan-keuntungan ekonomi jauh lebih egaliter.

Namun bagi Berger, semua pencapaian pembangunan di bawah ideologi sosialisme Cina *de facto* ditempuh melalui senjata teror. Teror merujuk pada penggunaan kekerasan fisik secara besar-besaran oleh pemerintah terhadap penduduk yang ada di bawah kekuasaannya. Pencapaian yang dibuat dengan menghalalkan senjata teror harus dibayar dengan biaya manusia yang sangat besar dan menimbulkan kengerian tersendiri (Berger, 2004). Keyakinan-keyakinan dan program-program — seperti “Perjuangan Terus-Menerus”, “Lompatan Besar ke Depan”, “Reformasi melalui Kaum Buruh”, dan “Revolusi Budaya Besar Kaum

Proletar” — memaksa masyarakat Cina untuk menanggung pemerintahan teror (Freedom Institute, 2021).

Bagi Berger, gerakan-gerakan revolusioner mana pun hampir selalu mencoba untuk sengaja menciptakan kekacauan — dengan menggunakan kekerasan untuk mengacaukan kegiatan sehari-hari dari kehidupan masyarakat, dan strategi-strategi yang tak terhindarkan menimbulkan korban-korban pembunuhan dan cacat dalam jumlah besar di antara para penduduk yang tak berdosa. Selain itu, ada bentuk teror yang lebih lunak — berupa tekanan psikologis, penghinaan di depan umum, pemukulan dan kadang-kadang penyiksaan, hukuman penjara, kerja paksa, dan pemindahan secara terpaksa. Penerapan pembangunan melalui sistem yang menindas inilah yang dikritik oleh Berger karena mengorbankan kebebasan individu (Berger, 2004).

PERHITUNGAN PENDERITAAN

Sejarah peradaban umat manusia diwarnai oleh aneka pengalaman penderitaan — kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, peperangan, perbudakan, eksploitasi, pembantaian massal, polarisasi pendapatan, dan sejenisnya. Namun, bagi manusia, sederet pengalaman penderitaan yang dialami bukanlah fakta absolut dan berlangsung permanen. Di hadapan aneka pengalaman penderitaan yang mencekam dan menekan, manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal budi, berjuang untuk menemukan aneka kemungkinan agar bisa bebas dari jerat penderitaan yang dialami.

Salah satu buah pergumulan intelektual yang dianggap relevan untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan kesengsaraan hidup adalah pembangunan. Bagi Berger, pembangunan bertujuan untuk mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya (Berger, 2004). Pembangunan hadir untuk mengubah kondisi kehidupan manusia. Pembangunan memungkinkan terjadinya transformasi keadaan manusia dari yang buruk menuju suatu tatanan yang lebih baik. Jadi, bagi Berger, indikasi keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada pengurangan penderitaan manusia (Badj, 2020). Kapitalisme dan sosialisme memang memiliki visi ini, tapi keduanya kerap jatuh pada upaya menciptakan polarisasi pendapatan dan penggunaan senjata teror dalam mewujudkan pembangunan.

Namun, apa yang diharapkan Berger *de facto* tidak selamanya terpenuhi dalam proses pembangunan misalnya model pembangunan kapitalis di Brazil dan pembangunan sosialis di Cina. Kapitalisme memungkinkan terciptanya ketidakadilan dan kesenjangan sosial. “Kue” pembangunan hanya dinikmati oleh elite politik dan kelompok tertentu, sedangkan masyarakat tidak. Selain itu, pembangunan ideologi sosialisme yang menjanjikan adanya revolusi di Cina justru menimbulkan kekacauan karena menghalalkan senjata teror dan intimidasi. Bagi Berger, kapitalisme dan sosialisme sama-sama menambah beban penderitaan manusia, meningkatkan polarisasi penduduk dari segi pembagian pendapatan, dan menunda peringanan kesengsaraan dari masyarakat yang paling tidak berpunya (Berger, 2004).

Sebagai alternatif, Berger mengajukan kriteria etis yang seyogianya dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik pembangunan yaitu *calculus of pain* (perhitungan penderitaan). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh

Berger merujuk pada pelbagai penderitaan fisik sebagai konsekuensi logis dari pembangunan seperti: kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, wabah penyakit, kerusakan ekologis, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan. Perhitungan penderitaan, demikian Berger, mutlak perlu diterapkan pada setiap model pembangunan, pun pada setiap model perubahan sosial yang dibuat (Berger, 2004)

PERHITUNGAN MAKNA

Pembahasan Berger tentang perhitungan makna didahului dengan sebuah pernyataan tentang pengandaian nilai yang mendasar, yakni: “manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna. Menghormati hak ini merupakan suatu keharusan moral bagi kebijakan politik” (Berger, 2004). Kebutuhan akan makna berakar di dalam hakekat manusia. Manusia mampu memproyeksikan makna ke dalam alam semesta. Manusia memberi nama kepada benda-benda dan menciptakan tata susunan pengertian yang luas (bahasa, sistem lambang, lembaga) yang merupakan pedomaan yang mutlak diperlukan dalam hidupnya. Kendati diwujudkan oleh setiap orang, namun kecenderungan manusia memberi makna tersebut merupakan kegiatan kolektif. Artinya, manusia secara bersama-sama, dalam berbagai kelompok yang besarnya bermacam-macam, terlibat dalam kegiatan memberi makna pada realitas. Jadi, makna bukanlah suatu yang diimbuhkan ke dalam kehidupan masyarakat, yang dapat diindahkan atau diabaikan sesuai dengan kepentingan khusus seseorang. Sebaliknya, makna dilihat sebagai gejala sentral dalam masyarakat, dan tidak ada segi kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti tanpa memperhatikan apa maknanya bagi masyarakat bersangkutan (Berger, 2004).

Kebutuhan akan makna mempunyai dimensi-dimensi kognitif dan normatif. Manusia harus mengetahui apa adanya dan apa yang seharusnya. Setiap masyarakat menyediakan bagi anggota-anggotanya suatu “peta kognitif” mengenai realitas dan suatu moralitas yang dapat diterapkan. “Peta kognitif” memberitahukan kepada anggota masyarakat itu “di mana mereka berada”, sedangkan moralitas mengarahkan apa yang mereka lakukan dalam “kedudukan” tertentu. Kedua dimensi ini saling mengandaikan sebab suatu moralitas tak mungkin masuk akal tanpa disertai “peta kognitif”. Baik kehidupan bersama maupun kehidupan pribadi tidak mungkin tanpa suatu kerangka makna (baik dalam arti kognitif maupun normatif). Karena itu, meniadakan hak seseorang atau sebuah kelompok akan makna yang mengatur kehidupannya adalah sama dengan meniadakan kemungkinan hidup itu sendiri (Berger, 2004).

Bagi Berger, perhitungan makna merupakan salah satu segi terpenting berhubungan dengan biaya manusiawi. Sekalipun penderitaan fisik adalah paling dasariah, namun penderitaan dalam arti kognitif dan psikis bila menuntut biaya yang terlalu mahal, yakni kalau makna hidup manusia dicaplok begitu saja tanpa ada gantinya (Berger, 2004). Pendekatan pembangunan tidak semata-mata hanya mendapatkan barang-barang material, tapi pembangunan harus selalu memperhitungkan makna hidup manusia sendiri sebab manusia tidak hanya hidup dari roti saja (Berger, 2004). Kebijaksanaan pembangunan harus dapat menghargai nilai-nilai masyarakat setempat. Setiap kebijakan politik yang dibuat mesti sanggup mendefinisikan situasi riil kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perlawanan terhadap pembangunan atau kontra modernisasi tidak terjadi.

Perhitungan makna (*calculus of meaning*) merujuk pada pertimbangan raibnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki. Semua kearifan lokal yang ada dalam masyarakat berperan penting dalam memberi makna pada kehidupan serta mengarahkan tingkah laku masyarakat sendiri. Karena itu, tuntutan etisnya ialah semua kearifan lokal dalam masyarakat tidak boleh dihilangkan dan dieksploitasi. Ia harus dijaga dan dilindungi. Jika pembangunan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal, maka pembangunan itu akan tidak memiliki signifikansi bagi masyarakat. Pembangunan dengan mengabaikan nilai-nilai kearifan akan gagal dan memaksa manusia hidup dalam suatu dunia tanpa makna (Berger, 2004).

Ungkapan Berger di atas merupakan himbauan etis sekaligus kritik terhadap model pembangunan yang hanya berorientasi pada perolehan profit sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan nilai-nilai atau praktik-praktik luhur yang ada dalam kelompok masyarakat. Bagi Berger, manusia tidak hanya menggantungkan hidupnya pada barang-barang material semata, tapi juga pada nilai-nilai kearifan lokal (Berger, 2004). Karena itu, penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut harus diperhitungkan dalam proyek pembangunan agar tidak menimbulkan resistensi atau perlawanan dari masyarakat.

POLEMIK GEOTERMAL DI POCO LEOK, MANGGARAI DARI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK PEMBANGUNAN BERGER

Pada bagian-bagian sebelumnya, penulis telah memaparkan secara komprehensif keterkaitan yang erat dengan polemik geotermal di Poco Leok dan refleksi filosofis Berger tentang etika politik pembangunan. Pada bagian ini, penulis berupaya untuk menawarkan suatu telaah terkait nilai relevansi etika politik pembangunan Berger terhadap polemik geotermal di Poco Leok yang saat ini masih memicu pro-kontra.

Pertama, berdasarkan pemikiran Berger, penulis beranggapan bahwa proyek geotermal Poco Leok beroperasi di bawah ideologi kapitalisme. Hal ini tampak dalam optimisme pemerintah setempat bahwa kemajuan di Manggarai dapat bergantung pada Geotermal karena Geotermal dapat dipakai untuk mendukung industrialisasi, misalnya industrialisasi pertanian, dan meningkatkan kapasitas energi listrik. Keyakinan pemerintah tersebut tampak bersifat materialistis. Pemerintah hanya melihat proyek geotermal Poco Leok hanya dari perspektif ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dari kehidupan misalnya aspek ekologis dan budaya. Pemujaan yang berlebihan terhadap aspek ekonomi yang mendorong pemerintah untuk terus melaksanakan proyek geotermal akan berkonsekuensi pada eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan potensi penyebaran penyakit yang menimpa masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan Poco Leok yang bergerak di bawah ideologi kapitalisme tidak akan membebaskan masyarakat dari penderitaan, tetapi justru memperdalam krisis yang dialami masyarakat adat Poco Leok. Hal ini akan bermuara pada ketimpangan pendapatan, di mana pemerintah semakin beruntung sedangkan masyarakat hanya menerima aneka dampak destruktif yang muncul setelahnya.

Kedua, kritik terhadap proyek geotermal Poco Leok dari sudut pandang kritik Berger terhadap ideologi sosialisme. Bagi Berger, pembangunan berideologi sosialisme berpotensi menciptakan sentralisasi birokrasi dan cenderung mengandalkan senjata teror. Sentralisasi birokrasi merujuk pada fakta bahwa yang menentukan kebijakan pembangunan ialah pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk tunduk pada kebijakan pemerintah. Sedangkan pendekatan menggunakan senjata teror tampak dalam aneka tindakan anarkis, represifitas, intimidasi, privatisasi lahan, penyekapan, dan penyiksaan. Apa yang dikemukakan Berger tampaknya sedang terjadi juga di Poco Leok. Sebagaimana dijelaskan di awal, di Poco Leok banyak masyarakat mengalami perlakuan kasar, intimidasi, represifitas, dan sejenisnya. Menghadapi fakta tersebut, kritik Berger terhadap sosialisme semestinya menjadi bahan autokritik bagi pemerintah. Penentuan kebijakan pembangunan seyogyanya tidak boleh hanya dimonopoli oleh pemerintah, tapi juga mesti membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat adat Poco Leok. Pemerintah harus membuka ruang diskursus publik yang rasional dengan masyarakat agar mencapai konsensus yang dapat diterima semua orang. Masyarakat harus dimintai pendapatnya secara bebas, dan tuntutan mereka tidak boleh direspons secara represif.

Ketiga, perhitungan penderitaan. Bagi Berger, pembangunan adalah upaya mengurangi penderitaan manusia. Pembangunan tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan politik. Berger menekankan bahwa pembangunan tidak hanya tentang meningkatkan pendapatan atau produksi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan menjamin martabat manusia (Berger, 2004). Inilah tujuan mulia dari pembangunan. Guna mencapai tujuan mulia ini, Berger mengemukakan bahwa salah satu kriteria etis yang harus dipertimbangkan dalam proyek pembangunan ialah perhitungan penderitaan. Perhitungan penderitaan tersebut mencakup kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, wabah penyakit, kerusakan ekologis, dan ketimpangan pendapatan. Untuk konteks Poco Leok, proyek geotermal yang sedang beroperasi harus menjadikan perhitungan penderitaan masyarakat sebagai pertimbangan prioritas dalam menentukan kelanjutan dari proyek ini.

Keempat, perhitungan makna. Selain perhitungan penderitaan, perhitungan makna juga menjadi salah satu kriteria etis yang dikemukakan oleh Berger dalam proses pembangunan karena manusia berhak untuk hidup dalam suatu tatanan dunia yang bermakna. Proyek geotermal Poco Leok berpotensi mengikis berbagai makna hidup yang telah lama dihidupi oleh masyarakat adat di sana. Perampasan tanah, privatisasi lahan, tidak mempedulikan nilai-nilai luhur dan hukum adat di Poco Leok mengandaikan bahwa proyek geotermal ini nyaris mengabaikan pertimbangan perhitungan makna. Bertolak dari perspektif Berger, proyek geotermal Poco Leok seyogyanya memperhatikan aspek perhitungan makna ini karena pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal tidak akan berarti apa-apa bagi masyarakat.

Berdasarkan telaah penulis, itulah empat poin kunci dalam etika politik pembangunan Berger yang relevan terhadap polemik pembangunan geotermal di Poco Leok, Manggarai. Etika politik pembangunan Berger seyogianya menjadi kompas moral sekaligus tuntutan etis yang harus diperhatikan secara serius dalam mempertimbangkan keberlanjutan proyek geotermal ini. Karena itu, kelanjutan

proyek ini harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan dan kerugian bagi masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

PENUTUP

Proyek geotermal Poco Leok yang dicurigai sedang beroperasi di bawah bayang-bayang model pembangunan berideologi kapitalisme dan sosialisme — yang menjadi cikal-bakal polemik antara pemerintah dan masyarakat — bukanlah sebuah persoalan sepele yang layak dibiarkan begitu saja. Proyek geotermal berideologi kapitalisme yang lebih mengutamakan profit tanpa mempertimbangkan aneka ekses destruktif yang akan menimpa masyarakat dan sosialisme yang mengidealkan sebuah revolusi dengan menghalalkan senjata teror, represifitas, dan intimidasi layak dikutuk karena keduanya sama-sama menyebabkan luka ekologis dan luka kemanusiaan. Mengikuti Berger, pembangunan geotermal Poco Leok harus mempertimbangkan perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) — kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, wabah penyakit, kerusakan ekologis, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan — dan perhitungan makna (*calculus of meaning*) — pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan, dan peradaban yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, W. U. (2023). Kajian Terhadap Pembangunan Geotermal Di Pulau Flores Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan (John Rawls). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 286–302. Retrieved from <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1760>
- Andriyani, T. (2025). UGM Sosialisasikan Pengembangan Panas Bumi Berakar Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Timur. Retrieved from: <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-promotes-geothermal-development-rooted-in-local-wisdom-in-east-nusa-tenggara/>
- Badin, Lady. (2023). Manfaat Potensi Energi Geothermal Poco Leok, Strategi Pemerintah Mewujudkan Energi Murah dan Ramah Lingkungan. Retrieved from <https://rri.co.id/ntt/daerah/176641/manfaatkan-potensi-energi-geothermal-poco-leok-strategi-pemerintah-wujudkan-energi-murah-dan-ramah-lingkungan>
- Badj, B. (2024). Relevansi Etika Politik Peter L. Berger Bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia. *Lumen Veritatis*, 15(2), 193–211. Retrieved from <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v15i2.3291>
- Bau, S. S. (2022). *Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L Berger*. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Berger, P. L. (2004). *Piramida Kurban Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Fandari, A. El, Daryanto, A., & Suprayitno, G. (2014). Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan. *SEMESTA TEKNIKA*, 17(1), 68–82. Retrieved from <https://doi.org/10.18196/st.v17i1.412>
- Freedom Institute. (2021). Kapitalisme, Sosialisme, dan dunia ketiga (bagaimana peter l berger bergerak ke “kanan.” Retrieved from <https://www.freedom-institute.org/kapitalisme-sosialisme-dan-dunia-ketiga-bagaimana-peter-berger->

bergerak-ke-kanan-176

- Haryon, F. (2024). *Dilema Relasi Antara Demokrasi dan Kapitalisme: Tinjauan Kritis-Komprehensif Melalui Politik Pembangunan*. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Hasyim, I. (2024). Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Flores Jadi Korban Kekerasan polisi. Retrieved from <https://www.tempo.co/lingkungan/konflik-proyek-geothermal-poco-leok-jurnalis-flores-jadi-korban-kekerasan-polisi--2681>
- Karangora, D. (2023). Geothermal Poco Leok: Investasi Paksa yang Korbankan Rakyat. *NTT Express*. Retrieved from <https://www.nttmediaexpress.com/region-ntt/4249255606/geothermal-poco-leok-investasi-paksa-yang-korbankan-rakyat?page=3>
- Mandela, H. (2023). SK Geothermal Bupati Nabit Biang Jeritan Rakyat: Pemangku Kepentingan Desak Hentikan Proyek, Tinjau Ulang Hingga Cabut SK Penetapan. Retrieved from Berita Flores website: <https://beritaflores.com/2023/08/11/sk-geothermal-bupati-nabit-biang-jeritan-rakyat-pemangku-kepentingan-desak-hentikan-proyek-tinjau-ulang-hingga-cabut-sk-penetapan>
- Mesa, U. R. C. N. (2025). Ribuan Masyarakat Adat Demonstrasi Menolak Proyek Geothermal di Poco Leok. Retrieved from Aliansi Masyarakat Adat Nusantara website: <https://www.aman.or.id/news/read/2111>
- Poespowardojo, M. T. S., & Seran, A. (2016). *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern dan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tanggung, A., & Lajar, T. A. P. B. (2024). Bumi sebagai “Rumah”: Kritikan terhadap Proyek Geothermal Poco Leok dan Mataloko dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si’. In *Seri Buku Vox Ledalero* 72/1.
- Tim Flores. (2023). Pengukuran Lahan Proyek Geothermal Poco Leok, Flores Dikawal ketat Aparat, Protes Warga Direspon dengan Represi. Retrieved from Flores website: <https://flores.co/reportase/mendalam/54221/2023/06/22/pengukuran-lahan-proyek-geothermal-poco-leok-flores-dikawal-ketat-aparat-protas-warga-direspons-dengan-represi>
- Tim Flores. (2025a). Ngotot ‘Harus Bangun’ Proyek Geothermal Poco Leok, Nabit Klaim ‘Tidak Ada Negara yang Maju karena Pertanian,’ Persoalkan Sikap Gereja Katolik. Retrieved from <https://flores.co/reportase/mendalam/73584/2025/04/09/ngotot-harus-bangun-proyek-geothermal-poco-leok-nabit-klaim-tidak-ada-negara-yang-maju-karena-pertanian-persoalkan-sikap-gereja-katolik>
- Tim Flores. (2025b). Warga Poco Leok yang Unjuk Rasa Tolak Geothermal Bubar Usai Bupati manggarai Kerahkan Massa Tandingan. Retrieved from <https://flores.co/reportase/mendalam/76434/2025/06/05/warga-poco-leok-yang-unjuk-rasa-tolak-geothermal-bubar-usai-bupati-manggarai-kerahkan-massa-tandingan>
- Towijaya, T., Musyahar, G., Satria, N., & Ubaidillah, M. (2019). Pemanfaatan Geothermal Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. *JURNAL CAHAYA BAGASKARA*, 4(1), 11–17. Retrieved from

https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/cahaya_bagaskara/article/view/998

Wicaksono, R. A. (2023). Geothermal Poco Leok Investasi Paksa yang Korbankan Rakyat. Retrieved from <https://betahita.id/news/detail/8936/geothermal-poco-leok-investasi-paksa-yang-korbankan-rakyat.html?v=1688261808>